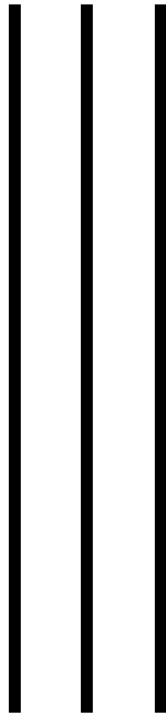


LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan negara didalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN adalah akuntabilitas. Asas ini bermakna “ Setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat.

Namun seiring dengan semangat reformasi orientasi akuntabilitas mengalami perluasan yang tidak terbatas pada aspek kepatuhan saja, tetapi lebih menekankan pada 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas) PP 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mempertegas bahwa selain akuntabilitas keuangan juga dibutuhkan akuntabilitas kinerja.

Kinerja dapat dipahami sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan jumlah dan kualitas yang sekurang – kurangnya dapat diukur.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sebuah pertanggungjawaban atas pelaksanaan program / kegiatan selama tahun 2024, yang merupakan siklus dari proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi. Instansi Pemerintah yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur baik secara administrasi maupun secara operasional.

b. Tujuan :

Tujuan Penyusunan LKIP adalah :

- a. Mempertanggungjawabkan kinerja Sekretariat Daerah kab. Flores Setda Kab. Flores Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang di tandai dengan adanya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas.
- b. Memberikan umpan balik dalam raangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang di perlukan dan peningkatan kinerja internal Sekretariat Daerah Kab. Flores Timur.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 2008 tetang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. DATA ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur di Pimpin oleh Sekretaris Daerah.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian sebagai Organisasi Perangkat Daerah, di bawah ini Sekretariat Daerah memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari :

- a) Kepala Bagian
- b) Kepala Sub Bagian
- c) Fungsional Umum
- d) Pelaksana

Adapun Jumlah PNS dan P3K : 121 Orang pada Sekretariat Daerah sampai dengan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
Perempuan	65	
Laki - Laki	56	

Berdasarka Kepangkatan :

Golongan	Jumlah	Ket
IV	15	
III	58	
II	16	
I	3	
Golongan IX	17	
Golongan VII	12	

Berdasarka Pendidikan

Pendidkan	Jumlah	Ket
S2	8	
S1	53	
DIV	6	
DIII	20	
SMA/Sederajat	39	
SLTP/Sederajat	3	
SD	2	

Berdasarkan Jabatan Struktural :

Jabatan	Jumlah	Ket
Eselon II	7	
Eselon III	8	
Eselon IV	3	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	21	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	18	
Terampil	12	
Non Eselon	103	

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah khususnya selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan lebih mudah dilakukan identifikasi atas indikator capaian kinerja dari perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang. Untuk itu sistematika Laporan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran singkat Organisasi , Sistematika Penyajian)

Bab II : Perencanaan Strategi (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kinerja Tahun 2025)

Bab III : Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran dan Pencapaian Kinerja, Evaluasi Kinerja, Akuntabilitas Keuangan)

Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI

A. VISI DAN MISI

Perencanaan Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 - 2026 yaitu :

1. Terwujudnya daya saing daerah
2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Timur merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program dalam RPJMD Kabupaten Timur kedalam Strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Timur. Rencana Strategi ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Timur untuk kurun waktu selama 2023-2036. Renstra juga menyajikan agenda utama Sekretariat Daerah Kab. Flores Timur untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada tahun tahun sebelumnya. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga berisikan sasaran – sasaran yang akan di capai dengan indikator keberhasilan yang dapat di ukur dan di verifikasi sehingga dapat di jadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Adapun tujuan yang diharapkan di capai Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur ke depan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202 4

Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 3 Program.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Laju Inflasi	100 %
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam membangun daerah	Presentase Predikat SAKIP	1 dokumen
		Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	19 Puskesmas , 4 OPD

NO	Program	Anggaran (Rp)	KET
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	3.002.065.301	Sumber Dana DAU
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.654.514.513	Sumber Dana DAU
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	19.466.558.715	Sumber Dana DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupate Flores Timur Tahun 2024 di lakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator, sasaran yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah dan realisasinya. Instansi Pemerintah berguna untuk menilai secara kuantitas dan kualitas serta efesiensi pelayanan publik terhadap kegutuhan atau keinginan masyarakat, selain itu pengukuran kinerja menuntun perbaikan – perbaikan demi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Pengukuran dan pencapaian kinerja tahun 2024 pada Sekretariat Daerah di lihat sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Laju Inflasi	100 %	98,78%	98,78%
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam membangun daerah	Presentase Predikat SAKIP	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	19 Puskesmas, 4 OPD	19 Puskesmas, 4 OPD	100 %

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah di capai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya Daya Saing Ekonomi , pengukuran kinerja sasaran dengan membandingkan anatar target dan realisasi pada1 indikator.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasa tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Pengendalian dan distribusi perekonomian	Laju Inflasi	Laporran	2	2

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam membangun daerah, pengukuran kinerja sasaran dengan membandingkan anatar target dan realisasi pada 2 indikator.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing – masing indikator diuraikan melalui tabel pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasa tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2

NO	Sasaran Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam membangun daerah	Presentase Predikat SAKIP	Dokumen	1	1
		Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
	SEKRETARIAT DAERAH	24.123.138.529	20.421.476.410	85%	
I	BAGIAN PEMERINTAHAN Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	552.738.810	551.234.680	100%	
	Administrasi Tata Pemerintahan	552.738.810	551.234.680	100%	
	- Penataan Administrasi Pemerintahan	270.169.560	268.733.950	99%	
	- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	125.569.440	125.563.930	100%	
	- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	156.999.810	156.936.800	100%	
II	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.820.999.181	1.604.174.500		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.820.999.181	1.604.174.500	88%	
	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	994.999.962	808.275.000	81%	
	- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	24.999.424	24.471.000	98%	

III	HUKUM	628.327.310	623.669.310		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	628.327.310	623.669.310	99%	
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	383.327.310	382.040.000	100%	
IV	- Fasilitasi Bantuan Hukum	220.000.000	217.868.460	99%	
	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	25.000.000	23.760.850	95%	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	250.392.906	238.640.938		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	250.392.906	238.640.938		
	- Fasilitasi Keprotokolan	119.966.650,00	118.277.052,00	99%	
	- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	81.999.056,00	72.738.886,00	89%	
	- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48.427.200,00	47.625.000,00	98%	
	PEREKONOMIAN	195.404.065	195.328.090		
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
V	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	195.404.065	195.328.090	100%	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	69.999.595,00	69.989.340,00	100%	
	- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101.404.870,00	101.344.150,00	100%	
	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	23.999.600,00	.994.600,00	100%	

VI	PEMBANGUNAN	110.759.400	109.636.300		
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	110.759.400	109.636.300	99%	
	- Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	32.929.530,00	32.565.000,00	99%	
	- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	29.929.940,00	29.665.000,00	99%	
VII	- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	47.899.930,00	47.406.300,00	99%	
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	179.129.579	179.082.447		
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	179.129.579	179.082.447	100%	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	30.499.810,00	30.477.725,00	100%	
VIII	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	31.249.769,00	31.244.200,00	100%	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	117.380.000,00	117.360.522,00	100%	
	PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.169.221.469	873.746.451		
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.169.221.469	873.746.451	75%	
	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	572.122.860,00	499.408.410,00	87%	
	- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	194.358.729,00	142.763.000,00	73%	
	- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	402.739.880,00	231.575.041,00	57%	

IX	ORGANISASI	395.273.669	390.293.513		
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	395.273.669	390.293.513	99%	
	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	182.233.332,00	181.505.980,00	100%	
	- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88.006.033,00	87.311.553,00	99%	
X	- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	125.034.304,00	121.475.980,00	97%	
	BAGIAN UMUM	16.243.381.109	13.589.410.029	84%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.989.491	49.965.600	100%	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.993.611,00	14.991.100,00	100%	
	- Kpprdinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	9.997.800,00	9.977.700,00	100%	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.998.250,00	9.997.800,00	100%	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.830,00	14.999.000,00	100%	
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.303.363.745	8.460.022.392	82%	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.844.372.745,00	8.023.032.392	81%	
	- Pelaksanaan SKPD Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	458.991.000,00	436.990.000,00	95%	

	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.387.078.303	1.758.389.416	74%	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	109.159.673,00	109.135.750	100%	
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	9.980.250,00	9.971.000	100%	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.996.955,00	29.992.500	100%	
	- Penyediaan Bahan Logistik	29.997.445,00	29.951.000	100%	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.999.830,00	64.999.400	100%	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5.900.000,00	900.000	15%	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	1.243.940.500,00	620.513.900	50%	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	893.103.650,00	892.925.866	100%	
	4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.588.095.350	1.565.826.980	99%	
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.210.418.400,00	1.203.346.000	99%	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	377.676.950,00	362.480.980	96%	
	- Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0%	
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.058.079.510	902.089.174	85%	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.810,00	2.998.300,00	100%	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	390.775.000,00	349.803.874,00	90%	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.304.700,00	549.287.000,00	83%	

XI	6 Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	681.804.910	678.436.289	100%	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.972.840,00	380.262.989,00	100%	
	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.832.070,00	228.448.300,00	99%	
	- Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana / Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.725.000,00	99%	
	7 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi pimpinan	174.969.800	174.680.178	100%	
	- Fasilitas Keprotokolan	100.000.000,00	100.000.000,00	100%	
	- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	74.969.800,00	74.680.178,00	100%	
	KEPALA DAEARH	2.577.511.031	2.066.260.152	80%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.172.125.511	878.495.681	75%	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	24.996.441	24.996.000	100%	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.970.000	8.275.000	69%	
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109.856.270	54.136.500	49%	
	- Penyediaan Bahan Logistik	9.999.670	9.951.500	100%	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.824.630	24.800.000	100%	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	10.001.000	350.000	3%	

-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	330.000.000	329.835.500	100%	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.477.500	426.151.181	66%	
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.590.000	107.345.188	71%	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.000	1.990.000	100%	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	149.595.000	105.355.188	70%	
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.981.230	178.466.231	94%	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	119.985.200	115.932.231	97%	
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.996.030	49.984.000	100%	
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	12.550.000	63%	
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	528.828.790	398.217.552	75%	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53.846.100	34.020.000	63%	
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39.999.690	34.590.000	86%	
-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34.983.000	29.607.552	85%	
-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	300.000.000	75%	

	5. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan	405.000.000	379.250.000	94%	
	- Penyediaan Kebutuhan Rumahtanggaan	405.000.000	379.250.000	94%	
	6. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	129.985.500	124.485.500	96%	
	- Fasilitas Keprotokolan	129.985.500	124.485.500	96%	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

B. SARAN

Adapun saran demi tercapainya sasaran, program/ kegiatan pada Sekretariat Daerah dan perbaikan di tahun yang akan datang. Perlu perbaikan – perbaikan sebagai tindak lanjut dari permasalahan – permasalahan yang ada antara lain dengan :

1. Mengupayakan efisiensi, penyesuaian program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program / kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dan Instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 pada Sekretariat Daerah kami sampaikan sebagai umpan balik dalam rangka memperbaiki perencanaan, penilaian kinerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. pemerintah Sekretariat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Larantuka, Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH

KAB. FLORES TIMUR,p



Drs. Petrus Pado Maran, M.si

Pembina Utama Muda

NIP. 197210301993111001

